

Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

Wasisto Raharjo Jati

PENULIS

*Korespondensi Penulis

Wasisto Raharjo Jati

wasisto.raharjo.jati@brin.go.id

Pusat Riset Politik – Badan Riset & Inovasi Nasional

<https://orcid.org/0000-0002-5448-7964>

CITATION

Jati, W. R. Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 70–84.

<https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.195>

ARTICLE HISTORY

Received:

12 September 2022

Accepted:

28 Desember 2022

Published online:

31 Januari 2023

Abstract

The rational voting behaviour within current Indonesian political situation is still debatable. It basically shows the different socio-economic and socio-political backgrounds among the voters that results in different voting behaviour expressions. The urban voters whom middle-class background seems to be rational voters. They would like to be open-minded accepting various preferences rather than one or two preferences. This makes the urban voters could critically asses the parties and candidates they preferred with. Most importantly, they would stress some important issues like money poltiics and national economic evaluation to address voting behaviour expressions. For some reasons, these two factors still be important issues in shaping political choices in Indonesia. This paper will further elaborate empirically the rational voting behaviour in Indonesia. Specifically, this paper used the survey data from 2014 and 2019 elections to elaborate rational voting behaviour recently. These two recent elections basically could represent the latest voting behaviour expressions in Indonesia.

Keywords: rational voting behaviour; Indonesian politics; elections; political preference

Abstrak

Perilaku memilih yang rasional dalam situasi politik Indonesia saat ini masih menjadi perdebatan. Hal ini pada dasarnya menunjukkan perbedaan latar belakang sosial ekonomi dan sosial politik di antara para pemilih yang menghasilkan ekspresi perilaku memilih yang berbeda. Pemilih perkotaan yang berlatar belakang kelas menengah tampaknya merupakan pemilih yang rasional. Mereka ingin berpikiran terbuka menerima berbagai preferensi daripada satu atau dua preferensi. Hal ini membuat pemilih perkotaan dapat menilai secara kritis partai dan kandidat yang mereka sukai. Yang terpenting, mereka akan menekankan beberapa isu penting seperti politik uang dan evaluasi kritis terhadap perekonomian nasional yang berpengaruh kepada ekspresi perilaku memilih rasional. Untuk beberapa alasan, ketiga faktor ini masih menjadi isu penting dalam membentuk pilihan politik di Indonesia. Tulisan ini akan lebih mengelaborasi secara empiris perilaku pemilih yang rasional di Indonesia. Secara khusus, makalah ini menggunakan data survei dari pemilu 2014 dan 2019 untuk mengelaborasi perilaku pemilih yang rasional belakangan ini. Dua pemilu terakhir ini pada dasarnya dapat mewakili ekspresi perilaku pemilih terbaru di Indonesia.

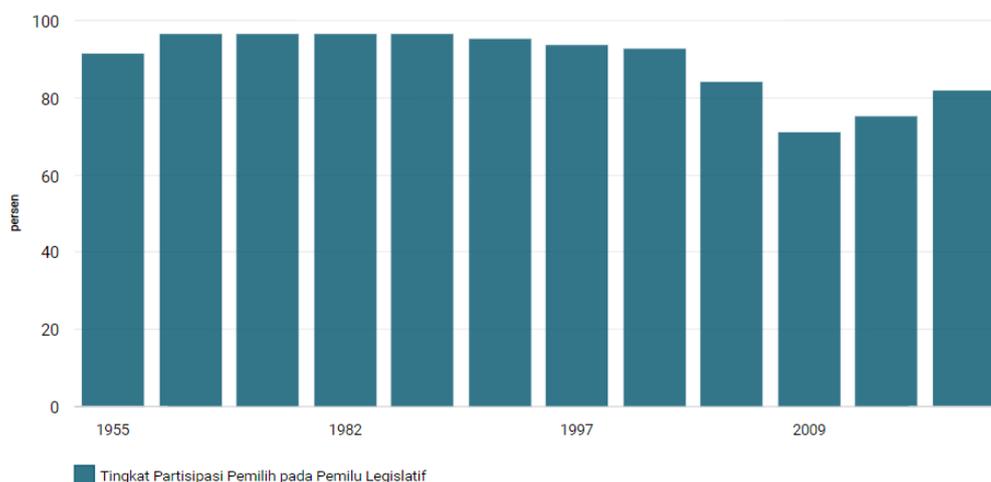
Kata Kunci: perilaku memilih rasional; politik Indonesia; pemilu; pilihan politik

Pendahuluan

Membaca konteks perilaku memilih dalam pemilu kekinian di Indonesia seperti membaca pengaruh fluktuatif faktor yang mengikatnya. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor hadir dan terlibat dalam mengkonstruksi perilaku memilih publik. Adapun pelbagai macam faktor tersebut seperti halnya sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya ikut berkontribusi penting dalam membentuk perilaku memilih tersebut (Biswas, 2022; Bornschieer, Häusermann, Zollinger, & Colombo, 2021; Jasiewicz, 2009; Rohendi & Muzzamil, 2021). Beberapa studi literatur terkini menunjukkan permasalahan perilaku memilih itu juga bagian dari evaluasi warga negara dalam menilai peforma para pejabat publik maupun dampak kebijakannya sehingga hal itu bisa berujung pada reward and punishment publik dalam politik. Maka tidaklah mengherankan apabila studi mengenai perilaku memilih kemudian menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut (Loew & Faas, 2019; Raymond & Worth, 2017).

Perilaku memilih pada dasarnya merupakan bentuk manifestasi dan ekspresi kesadaran berpolitik yang coba untuk diaktualisasikan individu dalam menentukan pilihan politiknya (DeCotiis & LeLouarn, 1981; McKenzie-Mohr & Schultz, 2014; Mutz, 2013). Masalah perilaku tersebut sangatlah tergantung dengan konteks preferensi politik yang mempengaruhinya dalam melihat dan menyikapi situasi politik kekinian (Leiserowitz, 2006; Pahlevi, Khalyubi, & Khatami, 2021). Adapun pembentukan preferensi politik sendiri dapat dikategorikan dalam berbagai skope yakni preferensi berbasis intelektual, preferensi berbasis emosional, preferensi berbasis kolejal, dan lain sebagainya. Ketiga bentuk preferensi tersebut kemudian bermuara pada sikap rasionalitas dalam memilih. Kecenderungan untuk mengerucut pada sikap rasional tersebut adalah cerminan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi namun belum pasti pilihan politiknya. Adanya sikap paradoks tersebut menunjukkan sikap kritis terhadap pilihan politik terutama dalam edisi pemilu mutakhir di tahun 2014 dan 2019.

Grafik 1. Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif (1955-2019)



Dalam dua edisi pemilu mutakhir, terlihat adanya tren kenaikan partisipasi pemilih yang signifikan. Ada kenaikan sebesar 6 persen dalam pemilu legislatif yakni 75,11 persen di 2014 menjadi 81,69 persen di 2019. Sedangkan dalam pemilu presiden menunjukkan juga tren kenaikan partisipasi pemilih sebesar 12 persen yakni dari 69,6 persen di pemilu 2014 menjadi 81,9 persen (Kusnandar, 2022). Fakta ini menunjukkan tingginya partisipasi pemilih dalam dua edisi terakhir dimana ada pertimbangan tertentu yang membuat mereka mau untuk menconteng di TPS. Adapun berbagai pertimbangan pada dasarnya dipengaruhi sikap logis terhadap suatu isu atau sikap kritis evaluatif terhadap partai maupun kandidat. Meskipun dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa polarisasi menjadi mesin utama mobilisasi

pemilih, namun itu sebenarnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi sikap pemilih (Jati, 2022a). Hal yang paling penting adalah faktor internal yang membentuk sikap rasionalisme tersebut. Berbagai kanal informasi yang disajikan lewat sosial media menjadi basis utama dalam membentuk pilihan politik. Dengan kata lain sikap logis dan kritis untuk menjadi basis utama dalam membentuk preferensi politik tersebut.

Maka kedua sikap logis dan kritis tersebut kemudian bermuara pada rasionalisme yang menjadi kata menarik dalam menganalisis preferensi pemilih dalam pemilu 2014 maupun 2019 lalu. Hal tersebut Pengertian rasionalisme dalam tulisan ini adalah perilaku politik yang mengedepankan adanya independensi maupun juga intelektualitas dalam mengartikulasikan pendapatnya. Kedua sumber itulah yang menjadi basis perilaku politik tersebut. Perilaku berpolitik rasio tersebut merupakan refleksi dari demokrasi mahzab Aristotelian yang melihat manusia sebagai *zoon politicon* yang mandiri dalam menyikapi sesuatu. Munculnya rasionalisme ini memang berkaitan dengan pemaknaan demokrasi substantif yang lebih melihat egalitarian dan partisipatorisme. Hal ini dikarenakan pada even pemilu ini merupakan transisi dari pola patrimonialisme menuju pada rasionalisme.

Premis penting yang perlu diketengahkan dalam menganalisa transisi perilaku pemilih tersebut adalah semakin kuatnya melek pengetahuan publik mengenai politik dan demokrasi dari berbagai macam sumber informasi. Adanya diseminasi dari media yang memberikan ruang afirmasi yang besar kemudian memproduksi kelas menengah terdidik di tingkat urban. Hal ini tentunya menjadi temuan yang berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya dimana perilaku memilih dipengaruhi adanya intimidasi maupun sistem pemilu yang tidak afirmatif (Boas, 2015; Fong, 2017; Pastor, 1999). Adapun dalam tingkat masyarakat rural sendiri, tingkat kritisisme publik sendiri belumlah sepadan dengan tingkat masyarakat urban dikarenakan faktor patriominalisme maupun juga figurisme sendiri masih menjadi faktor utama.

Munculnya kekuatan figuritas sebagai vote getter dalam demokrasi elektoral kali ini memang menjadi dilema dalam memaknai demokrasi sekarang. Harusnya yang terjadi adalah publik menjadi political master atas kandidat maupun partai yang coba mendekati dan mengumpulkan suara mereka. Namun yang terjadi kini justru adalah anomali yakni publik tidak lagi dimaknai subjek, tapi lebih kepada objek dimana mereka hanya didekati dan didengarkan aspirasinya seremonial normatif. Dengan memperhatikan hasil survei perilaku memilih pada tahun 2014 dan 2019, studi ini memfokuskan pada pertanyaan riset mengenai bagaimana dinamika pola perilaku pemilih rasional dan interseksinya dengan berbagai faktor dan isu keseharian terutama dalam bidang perekonomian. Pentingnya penelitian mengenai perilaku memilih rasional ini adalah untuk melihat pola baru pemilih yang kini secara bertahap mengedepankan rasionalitas dalam mengevaluasi kandidat maupun partai baik latar belakang maupun performa politiknya. Maka tujuan dari riset ini adalah mengelaborasi lebih lanjut mengenai perkembangan pola dan tren perilaku memilih rasional yang berlaku dalam kasus pemilu Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode analisa wacana kritis. Secara lebih lanjut, metode ini memungkinkan untuk mengelaborasi berbagai temuan data dan informasi secara kritis (Fairclough, 2010). Pendekatan ini secara lanjut berupaya untuk membuat narasi kritis dari kajian yang ada maupun sebelumnya untuk bisa mendapatkan celah temuan baru. Adapun berbagai data yang berupa hasil survei tersebut kemudian dianalisis dengan membuat berbagai variabel yang memuat studi persepsi misalnya saja politik uang. Setelahnya, setelah data hasil survei terkumpul berikut variabel terplihnya, lalu kemudian dirangkai menjadi sebuah analisa yang utuh dan komprehensif.

Secara lebih lanjut, Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti bisa mendapatkan temuan di balik intepretasi berbagai macam data tersebut sehingga menemukan pemahaman baru mengenai

studi/fenomena sosial politik yang sedang dikaji. Maka analisa wacana kritis kemudian Adapun data survei yang digunakan dalam tulisan ini adalah survei pemilu tahun 2014 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik – LIPI dan survei paska pemilu 2019 yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei Pemilu 2014 oleh Pusat Penelitian Politik LIPI dilakukan selama Mei-Juli 2014, sedangkan survei paska pemilu oleh LSI dilakukan pada Mei-Juni 2019 ([Lembaga Survei Indonesia, 2019](#); [Pusat Penelitian Politik - LIPI, 2014](#)).

Kedua data survei ini dipilih mengingat jumlah respondennya yang merata dan menyebar di seluruh Indonesia sehingga sangat representatif dalam melihat perkembangan dan pergeseran perilaku memilih. Secara lebih spesifik analisa perilaku memilih rasional dalam studi ini lebih menekankan pada persepsi pemilih yang difokuskan kepada tiga hal penting yakni uang politik (*money politics*), keadaan ekonomi, dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan. Ketiga isu mewakili mengenai sikap dan pola pikir kritis rasional dari pemilih sebelum mereka menentukan pilihannya. Ketiga isu pula sebenarnya juga memperlihatkan bagaimana posisi idealisme dari pemilih untuk bisa independen pilihan politiknya berangkat dari evaluasi kritisnya sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Perilaku memilih rasional ini sebenarnya merupakan ekspresi dari sebuah sistem demokrasi dan ekonomi yang mapan. Adapun relasi kausalitas tersebut menunjukkan bahwa rasionalitas pemilih itu juga disebabkan karena pengaruh paradigma *supply and demand* dalam ekonomi terlebih lagi bagaimana para politisi mengelola kebijakan ekonomi dan dampaknya ([Duch & Stevenson, 2005](#)). Hal tersebut yang berdampak evaluasi kritis pemilih baik yang bersifat retrospektif maupun prospektif ([McAllister, Sheppard, & Bean, 2015](#)). Adapun analisa retrospektif adalah upaya pemilih untuk bisa melihat ke belakang apa yang telah dicapai dan dampak ekonominya yang ditimbulkan. Sedangkan analisa prospektif lebih tertuju pada upaya pemilih untuk melihat secara kritis berbagai program yang ditawarkan oleh kandidat maupun partainya. Berbagai indikator kebijakan yang menggambarkan keadaan ekonomi mikro misalnya pengangguran maupun pendapatan perkapita menjadi faktor evaluasi penting bagi pemilih rasional ([Bingham Powell & Whitten, 1993](#)). Dengan demikian, karakter dasar dari munculnya pemilih rasional adalah evaluasi berbasis respons dari dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dengan kata lain, pragmatisme menjadi kata kunci dalam melihat posisi politik dari kelompok pemilih rasional ini.

Hal yang perlu dicatat ketika membaca kemunculan pemilih rasional di konteks negara berkembang tentunya berbeda dengan demokrasi mapan. Faktor penting yang membedakan adalah secara kuantitas populasi pemilih rasional yang lebih sedikit karena umumnya lebih terkonsentrasi di perkotaan. Selain itu pula secara kualitas sikap pragmatisme tidak selalu berujung pada sikap kritis dan idealis, namun lebih permisif dalam melihat ekonomi. Kedua premis inilah yang menjadi poin penting dalam membaca konteks pemilih rasional di negara berkembang khususnya Indonesia. Makna ekonomi ini tidak selalu berhubungan kebijakan, namun juga bisa uang politik yang lazim terjadi dalam banyak kasus kampanye di Indonesia ([Aspinal & Sukmajati, 2015](#)). Dalam kasus Indonesia ini memperlihatkan bahwa rasionalitas pemilih ini terkadang naik turun. Konteks ini terlihat bagaimana rasionalitas pemilih Indonesia tidak selalu idealis, bahkan dinamis. Kondisi ini yang menyebabkan rasionalitas pemilih Indonesia sendiri masih dalam tahapan transisi ([Jati, 2022b](#)).

Rasionalitas Pemilih dalam Menyikapi Politik Uang

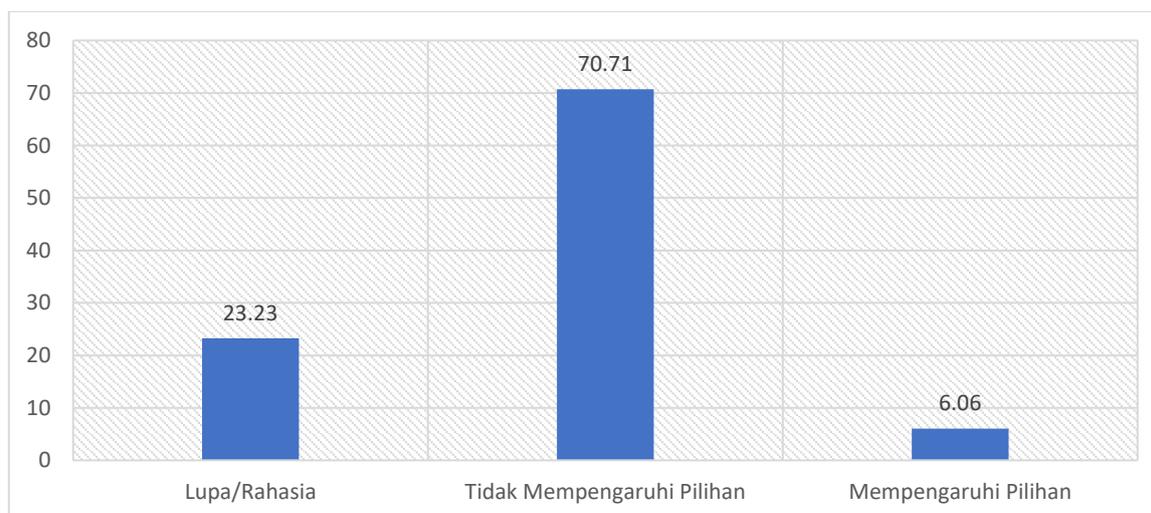
Secara garis besar, dalam dua pemilu terakhir di 2014 dan 2019, politik uang masih menjadi senjata utama dalam meraih suara pemilih. Terlebih lagi praktik itu akan semakin intensif dan masif dilakukan manakal sudah mendekati hari penconblosan suara dimana kelompok pemilih mengambang (*swing*

voters) menjadi sasaran utamanya. Namun demikian, segmen pemilih mengambang ini pula juga tidak sepenuhnya akan berubah pilihan politiknya kepada pihak tim sukses kandidat/partai tertentu. Dalam analisa komparasi terhadap dua hasil survei tersebut menunjukkan bahwa wacana uang politik akan mengontrol suara pihak tertentu tidak sepenuhnya benar. Dua hal penting dari ekspresi rasionalisme pemilih Indonesia kontemporer soal persepsi politik uang adalah 1) cenderung idealis yakni menolak/tidak menyukai pemberian uang politik demi kepentingan kekuasaan dan jabatan pada orang lain dan 2) cenderung pragmatis yakni menerima uang politik tersebut, namun masalah pilihan politik sekali lagi dikembalikan kepada hati nurani masing-masing.

Pada pemilu 2014, survey LIPI menunjukkan bahwa keefektifan money politic dalam mempengaruhi pilihan politik ternyata memberikan gambaran berbeda dengan berbagai studi dan analisa serupa sebelumnya. Studi sebelumnya mengemukakan bahwa Hasil survey IFES pada Juni 2014 menyebutkan bahwa penggunaan uang mempengaruhi pilihan politik sendiri mencapai 44 %. Senada dengan IFES, hasil survey LSI juga menunjukkan bahwa penggunaan politik uang secara efektif mempengaruhi preferensi politik sebesar 34 % (Rumah Pemilu, 2014). Bahkan dalam survey LSN pada Mei 2014 memperlihatkan bahwa pengenaan money politic sebagai orientasi utama pemilih dalam pemilu sendiri bisa mencapai 69 %. Berbagai studi sebelum survei LIPI di tahun 2014 secara kesimpulan bahwa praktik politik uang tidak bisa sepenuhnya dalam pemilu di Indonesia dengan semakin tingginya alokasi dana kampanye yang dicairkan.

Dari premis yang dikembangkan tersebut pola yang terbaca kemudian adalah money politic di Indonesia dalam berbagai analisis mengindikasikan bahwa pemilih tidak bisa digerakkan menuju tempat pemungutan suara jika tidak dilakukan pendekatan persuasif berbasis materi lebih dahulu. Persepsi ini memang sangat elitis dan klasik karena para kandidat maupun partai politik mengasumsikan bahwa pemilih Indonesia mudah tergoda dengan politik uang. Pemungutan suara dalam asumsi umum masih dikategorisasikan sebagai bentuk kegiatan yang membosankan dan hanya ujungnya membuat kaya para pejabat saja yang kembali mencalonkan diri kembali. Maka uang kemudian menjadi pemantik bagi pemilih untuk mengarahkan. Melalui temuan LIPI tahun 2014, menyebutkan bahwa rasionalisme pemilih sudah tumbuh dengan berupaya resisten dengan praktik politik uang tersebut. Dalam tabel dalam studi ini menjelaskan adanya diskrepansi antara asumsi awal dengan temuan terbaru.

Grafik 2. Pengaruh *Money Politic* dalam Perilaku Memilih (dalam persen)



Sumber: Laporan Akhir Survei Nasional 2014 (diolah)

Dalam grafik 2, kita bisa melihat bahwa pemilih pada pemilu 2014 sekarang ini mulai resisten dan apatis dengan adanya politik uang. Hasil survey memperlihatkan bahwa responden sebanyak 70,71 % menyatakan bahwa mereka independen dan netral dari politik uang. Sedangkan sebanyak 6,06 % sisanya sendiri menyatakan bahwa *money politic* sendiri mempengaruhi pilihan politik mereka. Sedangkan sisanya yang masih menjadi *unprecedented voters* masih ambigu antara pro dengan politik uang, ataukah lebih memihak pada sikap independensi dalam memilih pilihan politiknya. Tingginya angka kritis 70 persen bahwa mereka akan independen dan rasional ini tentu menjadi temuan penting yang dihasilkan oleh LIPI pada tahun 2014. Perilaku memilih rasional itu sudah dan terbentuk dengan sikap independen. Sikap independen ini pula yang kemudian menghasilkan fakta bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 adalah 75, 11 persen dibandingkan dengan mereka yang abstain atau golongan putih sebesar 24,89 persen.

Secara lebih lanjut, hasil survey LIPI menunjukkan tumbuhnya kesadaran kritis terhadap perilaku koruptif sendiri mulai tumbuh di kalangan masyarakat kelas menengah. Kesadaran kritis akan independensi sebagai pemilih ini kemudian dibingkai dalam bentuk apatisisme dan apolitis yang menolak pada praktik politik uang yang culas. Adanya kasus mega korupsi Bank Century dan Hambalang di akhir periode pemerintahan Presiden SBY seperti menjadi pemantik akan rasionalisme perilaku memilih di tahun 2014 ([Pusat Penelitian Politik - LIPI, 2014](#)). Selain itu pula sumbangsih media sosial dalam membentuk, mengkonstruksi, maupun juga melakukan *framing* atas pengetahuan publik.

Media berkontribusi besar dalam mengembangbiakan sikap anti politik uang kepada publik. Meskipun dalam taraf ini juga perlu disadari juga bahwa tidak selamanya media berperan sebagai alat demokrasi yang mencerahkan publik karena senantiasa ada praktik jurnalisme politik yang berkembang ada di sana. Publik tetap tercerahkan dengan semakin masifnya pemberitaan mengenai korupsi yang dilakukan oleh politisi maupun pejabat. Hadir dan tumbuhnya sikap terhadap uang politik sebagai bentuk penegasan sikap publik bahwa perilaku sedemikian hanya akan menguntungkan elit dan oligarki semata saja. Hasil yang menampakkan bahwa kesadaran kritis akan penolakan uang politik patut untuk diapresiasi dan disemai sikap tersebut dalam menyikapi politik yang ada.

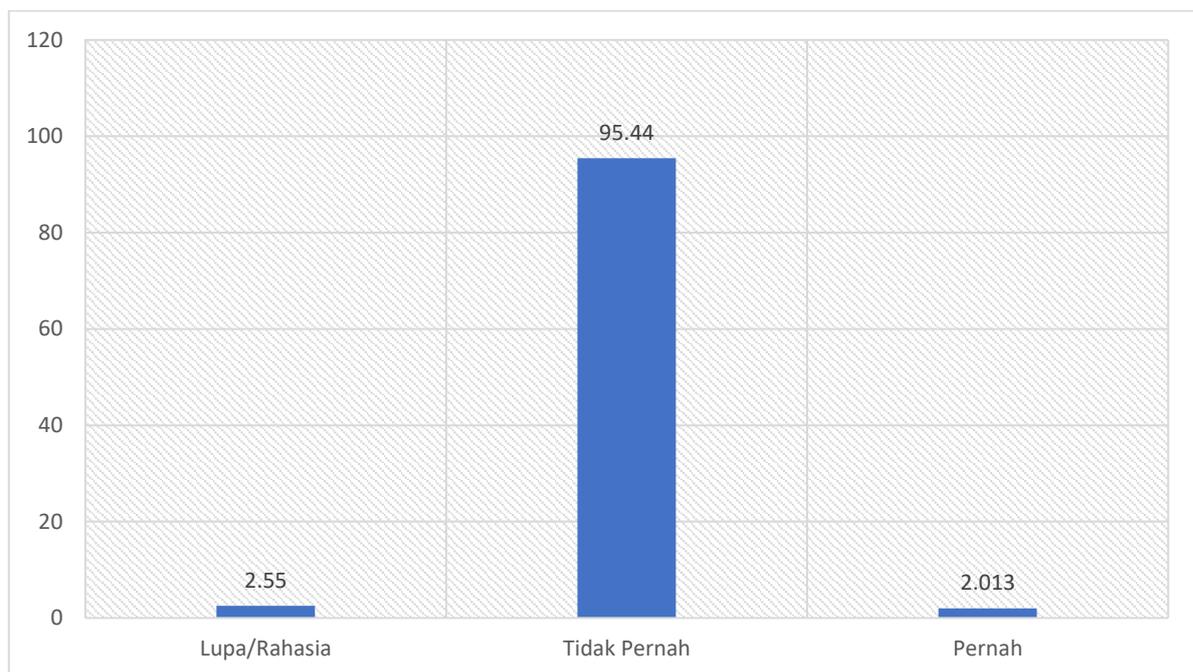
Tumbuhnya sikap rasionalisme di pemilu 2014 menimbulkan rasa optimis dikarenakan rasionalitas dalam pemilihan umum sendiri kemudian dapat terbentuk secara simultan. Adapun basis responden terbesar yang dapat dianalisis sendiri berasal dari kalangan urban sebanyak 43 % dibandingkan dengan penduduk rural sebesar 57 %. Meskipun secara kuantitas, ada ketimpangan antara pemilih urban dan rural. Paling tidak perilaku memilih rasional lebih terkonsentrasi di ruang perkotaan daripada pedesaan. Artinya memang kelompok kelas menengah ini menjadi basis penting penggerak dalam rasionalisme perilaku memilih ini. Mereka yang mapan secara ekonomi, berpendidikan, maupun informatif secara sosial akan menolak dalam meneirma politik uang yang ada terutama di tahun 2014. Adanya ketimpangan tersebut mengindikasikan bahwa rasionalitas dalam menghadapi godaan uang sebenarnya masihlah belum merata. Kadar kekritisian masyarakat sipil sebagaimana hasil survey tersebut masih perlu ditakar lebih lanjut apakah itu dibentuk secara permanen ataukah temporer. Jika merunut pada linimasa pembentukan kritisisme publik terutama menjelang pemilu ini lebih dikarenakan dibentuk atas dasar faktor emosional semata yang dibuat secara *by accident* dan *by figure*.

Adanya temuan ekspresi rasionalisme pemilih Indonesia dengan sikap independen dari politik uang juga terkait pula dengan adanya jaminan kebebasan berekspresi sebelum dan ketika masa kampanye 2014. Pada tahun 2014 itu memang terdapat euforia pemilih yang luar biasa mengingat saat itu Presiden SBY selaku inkumben tidak bisa maju lagi di Pilpres dan koalisi pengusungnya pun juga terkena skandal politik korupsi. Kondisi inilah yang mendorong pemilih untuk bisa ekspresif dalam pemilu 2014 agar pemerintahan yang dihasilkan tidak berujung nasib sama. Selain itu pula, munculnya figur populis seperti halnya Joko Widodo dan Prabowo Subianto semakin membuat pemilih bisa antusias mengikuti

pemilu 2014. Dengan kata lain bahwa, rasionalisme pemilih pemilu 2014 juga muncul karena tidak adanya intimidasi politik.

Dalam temuan survei LIPI pada pemilu 2014 menunjukkan bahwa ancaman intimidatif maupun kekerasan karena berbeda pilihan hampir dikatakan tidak ada. Sebagaimana terlihat dalam tabel dua bawah ini bawah, pemilih tidak pernah terancam dengan berbagai tindakan intimidasi dari kontestan pemilu manapun. Hal ini berpengaruh pada tingginya partisipasi pemilih pada pemilu 2014. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sikap rasional untuk bisa independen dari pengaruh politik uang ternyata tidak berujung pada aksi kekerasan dari pendukung atau tim sukses tertentu sehingga pemilih terjamin haknya.

Grafik 3. Intimidasi dalam Pemilu 2014

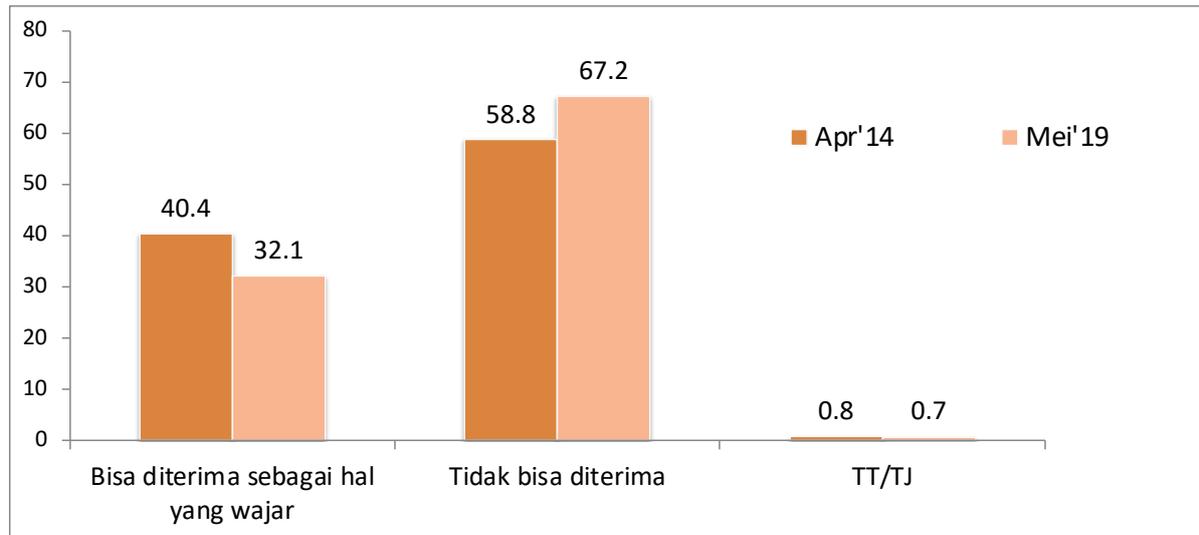


Sumber: Laporan Akhir Survei Nasional 2014 (diolah)

Dalam perhelatan pemilu 2014 lalu, intimidasi bukanlah menjadi ancaman bagi pemilih untuk mengartikulasikan pilihan politiknya. Hampir 95,44 persen responden menyatakan bahwa tidak ada ancaman yang dialamatkan kepada pemilih terkait dengan pilihan politiknya. Artinya pelaksanaan pemilu sendiri kemudian dilakukan secara benar dan nyata dalam pelaksanaannya. Sementara hanya sedikit sekali sekitar 2,65 responden yang menyatakan bahwa mereka merasa terindikasi terancam oleh pihak lainnya. Rasa aman dan nyaman dari intimidasi politik dengan tetap menjaga independensi dan idealisme dari politik uang menjadi poin penting terhadap ekresi perilaku pemilih rasional yang terjadi pada pemilu 2014.

Tumbuh dan berkembangnya perilaku pemilih rasional yang independen dari politik uang pada pemilu 2014 memiliki pola positif berkelanjutan pada pemilu 2019 silam. Dalam hasil survei LSI 2019 ini menunjukkan bahwa adanya semakin kuatnya sikap menolak politik uang dalam pemilu. Secara umum, dalam pemaparan tabel 2 ini menunjukkan bahwa pemilih Indonesia semakin enggan untuk bisa menoleransi politik uang sebagai sesuatu yang wajar dari 40 persen di April 2019 menjadi 32 persen di Mei 2019 serta semakin menolak tegas adanya perilaku politik uang yang sebelumnya 58 persen di April 2014 menjadi 67 persen di Mei 2019.

Grafik 4. Toleransi terhadap *Money Politic* dalam Perilaku Memilih



Sumber: Laporan Survei Post Election 2019 (diolah)

Dalam tabel kedua tersebut, menunjukkan prosentase besar sikap tidak menoleransi terhadap perilaku politik uang dalam pemilu dibandingkan dengan mereka yang menoleransi. Adapun mereka yang menoleransi politik uang ini prosentasenya minoritas. Meskipun rasionalisme pemilih mulai menguat, namun tidak juga bisa menjamin bahwa praktik politik uang sepenuhnya bisa hilang dalam konteks Indonesia. Politik uang sendiri telah menjadi semacam alat tawar politik (*bargaining politics*) demi pemenuhan kepentingan elektabilitas baik itu para kandidat maupun partai politik. Adapun berbagai studi sosial politik otoritatif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa money politic merupakan suatu keharusan dan taken for granted dalam penyelenggaraan pemilu ([Aspinal & Sukmajati, 2015](#); [Berenschot & Aspinal, 2020](#); [Muhtadi, 2018](#)).

Persoalan elektabilitas yang diraih dan diinginkan oleh kandidat maupun partai dalam kampanye pemilu sendiri tidaklah dengan cara kampanye ideologis. Dikarenakan politik uang telah menjadi kultur politik bagi elit politik, para kontestan tersebut juga mengalami dilema elektoral bahwa mereka juga khawatir dengan perolehan suara rival yang juga mengeluarkan banyak uang. Adanya dilema elit yang didorong adanya kekhawatiran kalah ini yang berdampak pada sebagian besar pemilih Indonesia bahwa politik uang menjadi bagian dinamika kampanye suatu kandidat maupun partai politik tertentu.

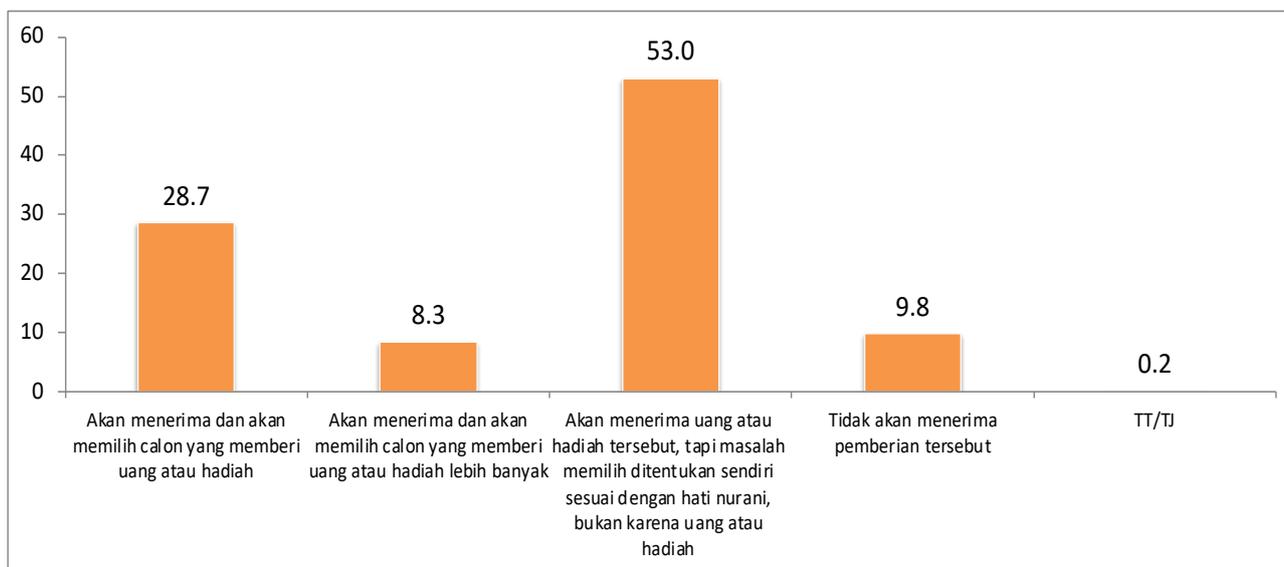
Masih adanya sikap permisif soal politik uang tersebut, secara prosentase mereka masih kalah suara dengan kelompok pemilih yang tidak menoleransi perilaku politik uang. Hal inilah pula yang menjelaskan adanya kelanjutan dari temuan pada perilaku pemilih rasional di tahun 2014 bahwa sikap rasionalisme pemilih Indonesia itu berjalan gradual dan simultan. Besarnya sikap tidak menoleransi terhadap politik uang dalam pemilu 2019 memang dipengaruhi oleh berbagai macam kompleksitas faktor mulai dari performa pemerintahan, skandal politik, maupun polarisasi identitas yang menggejala pada 2014-2019 ([Jati, 2022b, 2022a](#); [Mietzner, 2020](#)). Artinya bahwa ketiga faktor tersebut mempengaruhi betul sikap dan persepsi pemilih soal kandidat dan partai politik yang maju dalam pemilu 2019 lalu. Ketiga faktor itu pula yang sepertinya pula mempengaruhi preferensi pemilih Indonesia menjadi lebih kritis.

Temuan awal mengenai sikap tidak menoleransi politik sebagai temuan awal perilaku pemilih rasional pada tahun 2019 lalu ternyata juga tidak menjamin bahwa menolak pula politik uang. Hal ini cukup berbeda dengan ekspresi pemilih rasional pada 2014 silam dimana independensi menjadi kata kunci

dari godaan politik uang. Dalam tabel 3 di bawah ini menunjukkan bahwa terjadi semacam kecenderungan pragmatisme dalam menyikapi politik uang. Secara lebih lanjut, secara pragmatis mereka akan terima pemberian politik uang tersebut, namun secara rasional mereka tetap berpegang pada nurani dalam memilih calon/partai yang dipilihnya. Temuan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa perilaku memilih rasional dalam menyikapi politik uang seperti mengalami kemunduran idealisme sebagai pemilih.

Mengendurnya sikap independensi dari politik uang secara mutlak telah memberikan gambaran perilaku memilih rasional yang parsial pada pemilu 2019 lalu. Secara garis besar, sikap pragmatis dengan menerima uang menjadi strategi terkini untuk menghindari adanya sikap sungkan dengan para tim sukses maupun pendukung parpol/kandidat yang bersangkutan. Munculnya kesungkakan tersebut muncul karena pada dasarnya anggota tim sukses maupun pendukung parpol/kandidat tersebut masih terhitung kerabat maupun tetangga. Kondisi inilah yang membuat para pemilih menjadi mendua dengan sikap pragmatis di satu sisi dan sikap idealis di sisi yang berbeda. Sebagaimana yang terlihat dalam temuan tabel 4 di bawah. Sikap paradoks ini yang menjadi temuan menarik dalam melihat strategi pemilih untuk bisa mempertahankan rasionalismenya.

Grafik 5. Perilaku Pemilih terhadap *Money Politic* dalam Pemilihan Umum (Pemilu)



Sumber: Laporan Survei Post Election 2019 (diolah)

Dalam temuan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa secara mayoritas memperlihatkan adanya sikap pragmatisme pemilih dimana 53 persen pemilih mengatakan bahwa, mereka akan menerima pemberian uang/barang tapi hati nurani yang akan bicara ketika menentukan pilihan politiknya. Sedangkan mereka yang independen dan tidak pragmatis sebesar 9,8 persen. Secara jumlah kedua prosentase tersebut, rasionalisme pemilih Indonesia sebenarnya masih terjaga dan masih menjadi mayoritas. Adapun pemilih yang tergoda dengan politik uang sendiri secara prosentase tidak lebih dari 50 persen dari total jumlah populasi pemilih pada pemilu 2019. Temuan dalam tabel 4 ini juga menunjukkan pula sikap rasionalitas idealis dan independen mulai berkurang drastis dibandingkan pada pemilu 2014. Kondisi ini pula sebenarnya menjadi alarm penting dalam proyeksi 2024 mengenai prospek pemilih rasional nanti, apakah makin tergerus atau malah justru idealis.

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari faktor pertama yakni rasionalitas perilaku dalam menyikapi politik uang secara kuantitas masih terjaga dari pemilu 2014 ke pemilu 2019. Prosentase populasi pemilih

rasional yang didorong oleh kelompok kelas menengah ini masih mayoritas dan terdepan dimana jumlah mereka masih lebih dari 50 persen dari kajian komparatif survei pemilu 2014 dan 2019. Namun demikian, secara kualitas, terjadi semacam penurunan kualitas rasionalitas dalam memilih tersebut. Dalam pemilu 2014, sikap perilaku memilih rasional yang independen dari politik uang dan bebas dari intimidasi manapun menjamin idealisme pemilih tetap terjaga dan tersalurkan. Sedangkan pada pemilu 2019, rasionalitas perilaku memilih tidak lagi benar secara mutlak dan bulat 100 persen. Ada kecenderungan paradoks dimana pragmatis menerima uang seraya sambil idealis dalam pilihan politik akhirnya. Adanya temuan paradoks dalam menyikapi perilaku memilih rasional ini pulalah yang membuat kultur politik uang belum bisa sepenuhnya hilang dari politik Indonesia. Para kontestan pemilu masih berasumsi bahwa semakin derasnya politik uang yang disebar, maka probabilitas menang juga mudah. Namun mereka sepertinya juga alpa bahwa rasionalisme kini makin berkembang dan pemilih makin cerdas dan informatif soal pemilu berikut pula para kontestan yang bertarung nantinya.

Rasionalitas Pemilih dalam Menyikapi Peforma Ekonomi Negara

Diskusi mengenai relasi antara rasionalitas pemilih dengan keadaan ekonomi senantiasa mengalami fase naik turun. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya diferensiasi jumlah pendapatan, aksesibilitas, maupun juga ketercukupan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam melihat perilaku memilih ini. Perbedaan latar belakang sosio-ekonomi inilah yang berujung Hal pertama yang perlu untuk dikritisi adalah analisa terhadap deskripsi ekonomi Indonesia secara makro maupun mikro sehingga nanti bisa berkelindan dengan perilaku dan preferensi pemilih di Indonesia. Secara makro memang peforma ekonomi negara mempengaruhi perilaku memilih rasional. Jika perekonomian negara sedang baik dan stabil, maka berimplikasi positif terhadap kenaikan partisipasi pemilih. Sebaliknya bila perekonomian negara sedang turun, maka berimplikasi pada turunnya partisipasi pemilih. Adapun secara mikro, dampak kebijakan ekonomi juga mempengaruhi rasionalitas pemilih ([Bingham Powell & Whitten, 1993](#); [Duch & Stevenson, 2005](#)). Bagi mereka yang selama ini teridentifikasi sebagai kalangan menengah atas, mempunyai tendensi rasionalitas akan stabil. Sebaliknya mereka yang selama ini teridentifikasi sebagai kalangan menengah bawah, maka mempunyai tendensi rasionalitas yang fluktuatif.

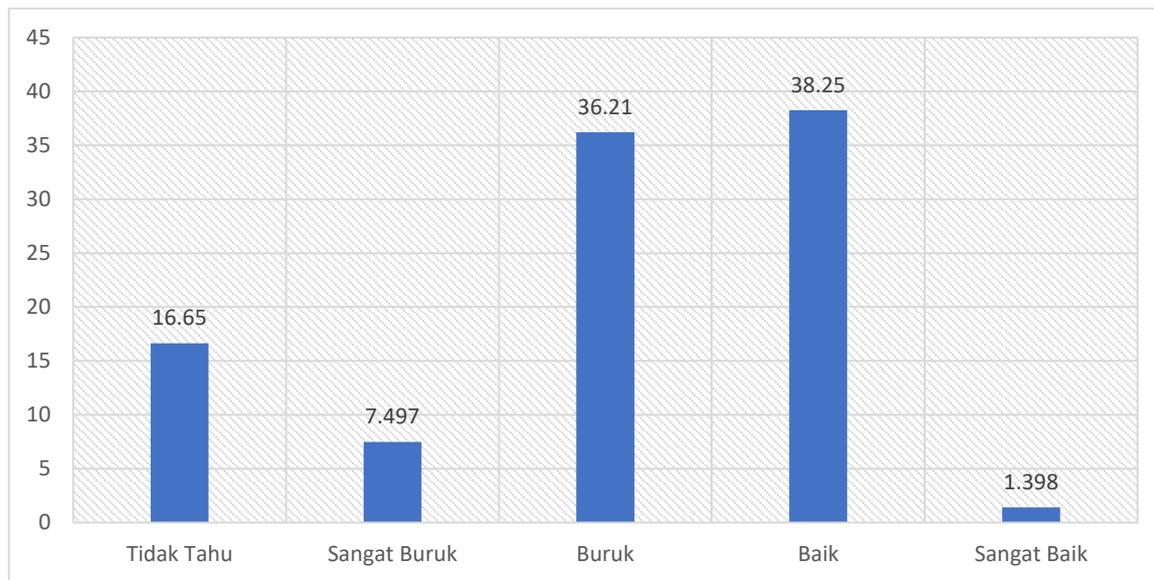
Secara garis besar, pada pemilu 2014 maupun 2019 menunjukkan bahwa rasionalitas pemilih dalam menyikapi peforma ekonomi negara tidaklah terlalu signifikan. Hal ini karena evaluasi sebagian besar pemilih menunjukkan bahwa kondisi ekonomi negara yang fluktuatif tidaklah berperan besar dalam penentuan pilihan politik. Oleh karena itulah, selalu muncul sikap pro dan kontra menyikapi kebijakan dan dampak perekonomian terhadap rasionalitas dalam pemilu. Pro dan kontra itu pada dasarnya merupakan refleksi kritis terhadap pencapaian ekonomi pemerintahan selama lima tahun sehingga ketika dikontraskan pada urusan pemilu, terlihat jelas pembilahan opini tersebut. Hal inilah yang menjadikan evaluasi peforma ekonomi dan dampaknya kepada perilaku memilih rasional selalu berada dalam level moderat.

Pada perhelatan pemilu 2014, secara makro ekonomi menurut BPS (2014) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 ini mencapai 5,12 persen dengan pengeluaran rumah tangga mencapai 5,70 persen dari PDB. Artinya terjadi keseimbangan rasio antara pemasukan dan pendapatan dalam ekonomi kita sendiri. Pemasukan pendapatan diraih dari semakin berkembangnya sektor perekonomian formal maupun juga informal sehingga mampu untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan penduduk. Letak kritis dalam memahami gambaran makro perekonomian adalah manakala pertumbuhan ekonomi sendiri berlaku tesis *trickle down effect* apakah itu berlaku secara kasuistik atau deliberative. Persoalan ini menjadi penting dan leksikal untuk dipahami untuk melihat seberapa derajat diferensiasi maupun juga vitalitas pemilih dalam pemilu. Dalam tabulasi ini bisa disimak adanya diferensiasi tersebut.

Jikalau dicermati lebih lanjut dalam menganalisis bab tersebut, kita bisa menyimak adanya perimbangan pandangan dalam melihat struktur perekonomian Indonesia. Sebanyak 36,21 persen

responden menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sendiri dalam kondisi yang buruk. Sedangkan 38,25 persen responden menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan stabil. Adanya dikotomi dalam melihat perekonomian itu kembali lagi pada diseminasi dan juga redistribusi kue perekonomian yang dilakukan oleh negara. Negara sendiri bertindak sebagai regulator Munculnya rasionalisme sebagai bagian bentuk preferensi politik memperlihatkan keduanya saling berkelindan. Terlebih lagi saat ini konstelasi demokrasi di Indonesia sendiri mengalami turbulensi antara patrimonialisme menuju rasionalisme.

Grafik 6. Keadaan Ekonomi Indonesia selama 2009-2014



Sumber: Laporan Akhir Survei Nasional 2014 (diolah)

Transisi ini yang membuat terkadang faktor perekonomian menjadi faktor determinan atau non determinan dalam pilihan politik. Adapun konteks rasionalisme sendiri yang tumbuh belumlah meluas, namun masih parsial dalam berbagai sektoral. Jika melihat pada konteks tabulasi di atas, kita bisa menyimak bahwa basis materi berupa pendapatan sangatlah memiliki andil besar dalam membentuk pilihan politik tersebut. Posisi kelas menengah menjadi penentu dalam melihat evaluasi ekonomi tersebut. Kecenderungan bagi segmen penduduk yang memiliki basis pendapatan menengah ke atas sendiri pada umumnya mendukung pemerintahan karena pemerintahan sendiri telah memberikan berbagai macam privilese ekonomi yang memberikan kemudahan bagi mereka untuk bebas berekspresi. Konglomerasi bisnis yang dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah atas yang pada umumnya dikuasai oleh borjuasi dengan politisi kemudian menghasilkan adanya rantai ekonomi rente. Kasus berburu rente yang dilakukan pejabat *cum* pengusaha memang merupakan kasus yang sudah awam terjadi dalam politik Indonesia. Dengan kata lain, sebenarnya terdapat sikap permisif sekaligus skeptis dalam membaca dampak ekonomi dengan perilaku memilih yang ada di Indonesia.

Adanya rasionalisme yang dihasilkan dari adanya akumulasi ekonomi itulah kemudian menjadi benteng diri tentang menghadapi *money politic* itu sendiri. Pemaknaan *money politic* sendiri sebagai bagian dari sesuatu yang destruktif dan permisif memang menjadi pemahaman baru dalam kelas menengah kita. Namun yang masih menjadi masalah kemudian, apakah rasionalitas politik yang dikedepankan oleh kelas masyarakat kita tersebut sifatnya permanen ataukah temporer. Dikotomi itulah yang sekiranya belum jelas untuk diinterpretasikan maupun dijelaskan lebih lanjut mengenai prospek dari rasionalitas yang dibangun dari relasi penguatan ekonomi dengan kelas menengah ini. Maka premis mengenai "bahwa semakin membaiknya kondisi ekonomi, maka akan berimplikasi langsung pada rasionalitas" mungkin belumlah menjadi generalisasi dalam melihat kasus Indonesia. Dikarenakan ada juga

kelompok masyarakat mapan yang masih menghamba subsidi dari negara sehingga menimbulkan adanya kelas masyarakat yang dependen dengan negara.

Maka tidak salah kemudian, rasionalisme juga tidak perlu menjadi patokan mendasar yang berlinier dengan adanya rasio independensi tersendiri. Malah justru yang terjadi kemudian adalah rasionalitas itu kemudian perlu dipertanyakan apakah berdasarkan dengan independensi apakah dependen dengan negara. Jika menggunakan premis pertama, rasionalitas yang didasarkan pada ekonomi mapan itu sebenarnya menunjukkan bahwa itu adalah ekspresi kedewasaan politik murni yang menuntut perubahan dan juga sikap kritis terhadap rezim. Adapun jika menggunakan perspektif kedua, rasionalitas tersebut dimaknai sebagai bentuk eksistensi dan survivalitas terhadap *comfort zone* maupun *status quo* yang ada dalam rezim sebelumnya. Oleh karena itulah, pilihan rasionalitas yang dijatuhkan kemudian adalah mencari-cari similaritas yang sama dengan karakteristik rezim sebelumnya. Hal inilah yang sekiranya membuat rasionalitas tersebut kemudian terpenjara dan terikat (*bounded rationality*) semata. Keputusan politik inilah yang kemudian gamang dan cenderung menggantung asap manakala pilihan menjadi rasional menjadi tidak pasti dan lebih mengikuti pada logika neo patrimonialisme semata.

Adapun pemaknaan mengenai *bounded rationality* ini terkait dengan nilai dan tujuan yang dimaksudkan. Nilai sendiri terkait dengan pegangan moral dan juga pegangan pandangan yang menjadi dasar dan memilih. Sedangkan dimaksudkan dengan tujuan sendiri diartikan sebagai dasar pamrih kenapa pemilih memilih figure atau partai politik tertentu. Hal inilah yang kemudian menempatkan posisi broker politik menjadi pionir penting dalam menciptakan rasionalisme secara artifisial. Dalam hal ini, broker politik sendiri selain halnya menciptakan adanya rasionalisme, juga menciptakan adanya loyalitas yang sifatnya terbatas.

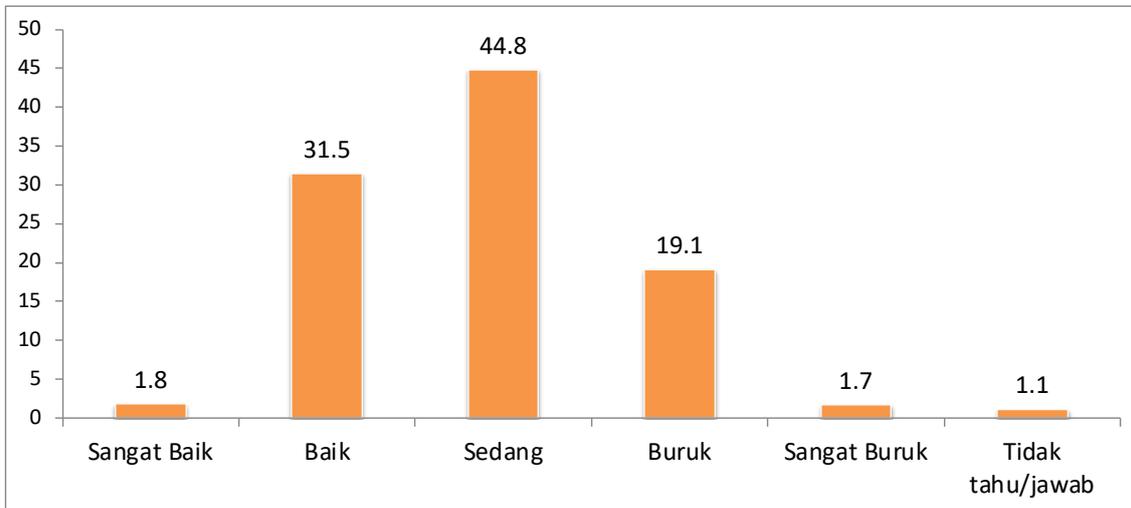
Artinya bahwa di satu sisi “relasi patron-client” sendiri dibutuhkan dalam menjembatani pemilih dengan kandidat. Terkait dengan posisi broker politik sendiri dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni golongan activist broker, opportunist broker, maupun juga patrimonial broker yang ketiganya memiliki pendekatan yang beragam (Aspinall, 2014; Berenschot & Aspinall, 2020). Adapun yang masuk dalam tipe activist broker lebih mengutamakan basis ideologi sebagai modal intrinsik menciptakan rasionalitas kepada para pemilih. Adapun segmentasi pemilih yang dituju biasanya adalah pemilih yang memiliki dasar ideologi kuat untuk memilih figure atau partai tertentu saja. Sedangkan yang tipe opportunist maupun juga patrimonial lebih mengutamakan pada pendekatan kultural maupun juga emosional dalam mendekati pemilih sendiri. Maka jika dikaitkan dengan prospek ekonomi yang menjadi basis mendasar dalam pembentukan rasionalitas. Maka tugas broker politik di sini adalah meyakinkan pada pemilih untuk mempertimbangkan mana program ekonomi yang dikira realistis untuk bisa diikuti dan dipahami sendiri.

Pertanyaan mengenai ekspresi rasionalisme pemilih dalam menyikapi performa ekonomi tampaknya tidak banyak berubah pada perhelatan pemilu 2019. Sikap moderat dalam menyikapi ekonomi tidak terlalu banyak berpengaruh pada pilihan politik. Alhasil yang terjadi kemudian adalah ada semacam stagnasi evaluasi kritis terhadap pencapaian ekonomi. Pemilih rasional tidak terlalu melihat bahwa perekonomian akan banyak berpengaruh pada pilihan politik. Hal ini dikarenakan masih adanya kebijakan subsidi di sektor vital maupun berbagai bantuan sosial yang membuat perekonomian kurang begitu menjadi faktor utama dalam evaluasi partai politik maupun kandidat.

Dalam tabel 6 berikut setidaknya menjelaskan bahwa persepsi pemilih rasional terhadap kondisi ekonomi tidak banyak berubah dibandingkan dengan kondisi perekonomian pada perhelatan pemilu 2014. Secara garis besar sebenarnya ekspresi rasionalitas yang muncul masih bersifat moderat dan menengah yang tidak sepenuhnya menyalahkan kondisi perekonomian. Secara lebih lanjut, ekspresi rasionalisme di tahun 2019 rupanya juga agak lebih kritis menyikap kondisi perekonomian nasional. Jika pada hasil survei 2014 menunjukkan bahwa pembilahan opini masih bersifat baik dan buruk. Maka

pada hasil pemilu 2019 sendiri pembilahan ekspresi rasional sendiri terdapat tiga opini besar yakni “baik”, “sedang”, dan “buruk” dimana opini “sedang” mendominasi evaluasi pemilih rasional tersebut.

Grafik 7. Persepsi Pemilih Terhadap Kondisi Ekonomi Indonesia di 2019



Sumber: Laporan Survei Post Election 2019 (diolah)

Mengacu pada hasil survei persepsi pemilih di tabel 6 tersebut, dapat dikatakan bahwa persepsi rasionalitas belum bisa digeneralisasi secara merata. Artinya persepsi itu muncul tidak selalu muncul karena kritis dan objektif dalam melihat dan merasakan capaian ekonomi, namun juga bisa karena subjektif dan partisan. Namun demikian, posisi persepsi “sedang” itu menunjukkan bahwa rasionalitas pemilih dalam melihat ekonomi masih berupaya untuk tidak terlalu ofensif dan permisif dengan kebijakan negara. Hal ini sebenarnya masih menandakan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu masih dimungkinkan mengingat massa pemilih rasional sendiri juga telah merasakan dampak dan kebijakan pembangunan ekonomi selama ini. Hal yang perlu dicatat pula dari persepsi ini adalah isu-isu kebijakan strategis misalnya harga BBM maupun pangan bisa saja berpengaruh terhadap persepsi ini yang ujungnya adalah evaluasi kritis terhadap para kandidat maupun partai politik yang mau berlaga di pemilu.

Kesimpulan

Secara garis besar, kemunculan kelompok pemilih rasional ini mulai menunjukkan pengaruhnya dalam dinamika politik Indonesia. Mereka berupaya tampil sebagai kelompok pemilih baru sebagai pemilih kritis dan independen sikap politiknya. Terkait dengan interseksi berbagai faktor yang mempengaruhi misalnya saja persepsi terhadap politik uang maupun kebijakan ekonomi lainnya, rasionalitas itu disesuaikan dengan kondisi dan isu yang berkembang saat itu. Artinya memang ekspresi pemilih rasional ini selalu dinamis.

Ekspresi pemilih rasional yang berkembang di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor perekonomian yakni persepsi terhadap politik uang maupun evaluasi terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, tampaknya persepsi politik uang ini yang mendominasi sikap rasionalisme pemilih tersebut. Hal ini dikarenakan godaan politik uang tersebut secara psikologis dan emosional berdampak langsung terhadap pilihan politik daripada evaluasi perekonomian nasional. Kondisi tersebut yang menyebabkan reaksi individual terhadap sikap rasionalisme yakni independensi dan pragmatisme dalam menyikapi politik uang. Dua hal tersebut sebenarnya bersifat paradoks, namun itulah yang

menunjukkan bahwa ekspresi pemilih rasional di Indonesia masih parsial yakni transisi dari patrimonialisme menuju rasionalisme.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih banyak kepada para pihak yang membantu riset ini terutama dalam pengumpulan data komparatif pemilu 2014 dan pemilu 2019. Pertama kepada Tim Survei Politik Pemilu 2014 dimana penulis menjadi bagian dari anggota tim dan enumerator survei untuk wilayah Jawa Timur 1. Kedua kepada Dr. Burhanuddin Muhtadi MA yang berkenan diskusi dan berbagi informasi soal pemilu 2019 silam.

Referensi

- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, (April 2015), 37–41. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How Clientelism Varies: Comparing Patronage Democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- Bingham Powell, G., & Whitten, G. D. (1993). Midwest Political Science Association Wiley A Cross-National Analysis of Economic Voting: Taking Account of the Political Context Author. *Source: American Journal of Political Science*, 37(2), 391–414.
- Biswas, F. (2022). Electoral patterns and voting behavior of Bihar in Assembly elections from 2010 to 2020: a spatial analysis. *GeoJournal*, (April). <https://doi.org/10.1007/s10708-022-10627-2>
- Boas, T. C. (2015). Voting for Democracy: Campaign Effects in Chile's Democratic Transition. *Latin American Politics and Society*, 57(2), 67–90. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2015.00267.x>
- Bornschieer, S., Häusermann, S., Zollinger, D., & Colombo, C. (2021). How “Us” and “Them” Relates to Voting Behavior—Social Structure, Social Identities, and Electoral Choice. In *Comparative Political Studies* (Vol. 54). <https://doi.org/10.1177/0010414021997504>
- DeCotiis, T. A., & LeLouarn, J. Y. (1981). A Predictive Study of Voting Behavior in a Representation Election Using Union Instrumentality and Work Perceptions. *Organizational Behavior and Human Performance*, 27(1), 103–118. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(81\)90041-6](https://doi.org/10.1016/0030-5073(81)90041-6)
- Duch, R. M., & Stevenson, R. (2005). Context and the Economic Vote: A Multilevel Analysis. *Political Analysis*, 13(4), 387–409. <https://doi.org/10.1093/pan/mpi028>
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
- Fong, B. (2017). In-between Liberal Authoritarianism and Electoral Authoritarianism: Hong Kong's Democratization Under Chinese Sovereignty, 1997–2016. *Democratization*, 24(4), 724–750. <https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1232249>
- Jasiewicz, K. (2009). “The past is never dead”: Identity, class, and voting behavior in contemporary poland. *East European Politics and Societies*, 23(4), 491–508. <https://doi.org/10.1177/0888325409342114>
- Jati, W. R. (2022a). Comparative Analysis of Clientelistic Democracy in India and Indonesia: Outcomes and Challenges. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(1).

<https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.38487>

- Jati, W. R. (2022b). Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 152–167.
- Kusnandar, V. B. (2022). Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif 1955-2019. Retrieved July 11, 2022, from Data Boks Katadata website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-legislatif-1955-2019>
- Leiserowitz, A. (2006). Climate change risk perception and policy preferences: The role of affect, imagery, and values. *Climatic Change*, 77(1–2), 45–72. <https://doi.org/10.1007/s10584-006-9059-9>
- Lembaga Survei Indonesia. (2019). *Laporan Survei Post Election 2019*. Jakarta.
- Loew, N., & Faas, T. (2019). Between Thin- and Host-ideologies: How Populist Attitudes Interact with Policy Preferences in Shaping Voting Behaviour. *Representation*, 55(4), 493–511. <https://doi.org/10.1080/00344893.2019.1643772>
- McAllister, I., Sheppard, J., & Bean, C. (2015). Valence and spatial explanations for voting in the 2013 Australian election. *Australian Journal of Political Science*, 50(2), 330–346. <https://doi.org/10.1080/10361146.2015.1005005>
- McKenzie-Mohr, D., & Schultz, P. W. (2014). Choosing Effective Behavior Change Tools. *Social Marketing Quarterly*, 20(1), 35–46. <https://doi.org/10.1177/1524500413519257>
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Muhtadi, B. (2018). Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara. In *Pembiayaan Pemilu di Indonesia* (pp. 95–117). Jakarta: Bawaslu RI.
- Mutz, D. C. (2013). The Consequences of Cross-Cutting Networks for Political Participation. *American Journal of Political Science*, 46(4), 838–855. <https://doi.org/10.2307/3088437>
- Pahlevi, M. E. T., Khalyubi, W., & Khatami, M. I. (2021). Persepsi Pemilih Milenial Dalam Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.11>
- Pastor, R. A. (1999). The role of electoral administration in democratic transitions: Implications for policy and research. *Democratization*, 6(4), 1–27. <https://doi.org/10.1080/13510349908403630>
- Pusat Penelitian Politik - LIPI. (2014). *Laporan Akhir Survei Nasional 2014: Partisipasi Politik dan Partisipasi Pemilih*. Jakarta.
- Raymond, C. D., & Worth, R. M. (2017). Explaining voting behaviour on free votes: Solely a matter of preference? *British Politics*, 12(4), 555–564. <https://doi.org/10.1057/s41293-016-0023-7>
- Rohendi, R., & Muzzamil, F. (2021). Tipologi Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018: Studi tentang Tipe Pemilih dari Kalangan Remaja di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 46–65. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.46>
- Rumah Pemilu. (2014). Money Politic Hantui Pileg. Retrieved July 24, 2022, from Rumah Pemilu website: <http://www.pemilu.com/berita/2014/03/money-politics-hantui-pileg-2014>